

3



ARTIKEL PENELITIAN

ANALISIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PALEMBANG

Oleh :
AZWARDI
Nip. 132059494

Dibiayai oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Nomor Kontrak : 021/P4T/DPPM/PDM/III/2003
Tanggal 28 Maret s/d 28 Oktober 2003

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
OKTOBER 2003

**ANALISIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KOTA PALEMBANG**
AZWARDI *

This research is purposed to know the impact of regional outonomy in Palembang, especially in fiscal aspects. To solve the problem, that compare the situation after regional outonomy and before, so we use non-parametric statistic, ***Mann-Whitney test***.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan otonomi daerah di Kota Palembang, khususnya di bidang fiskal. Untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu apakah terdapat perbedaan secara statistik setelah pelaksanaan otonomi daerah dengan era sebelumnya, maka digunakan statistik non-parametrik berupa uji ***Mann-Whitney***.

1. Pendahuluan

Untuk mengatasi ketimpangan fiskal, interpersonal dan spatial, maka pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melaksanakan otonomi daerah, berupa desentralisasi pemerintahan dan fiskal. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah No. 25. Tahun 1999. (Mahi, 2000; 1 ; Sjafrijal, 2000; 3-10).

Salah satu aspek yang dapat didesentralisasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kewenangan di bidang fiskal. Menurut Boex

* Dosen FE Unsri

(2001; 3) desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi di bidang fiskal yang didapat oleh pemerintah daerah selanjutnya dipertanggung jawabkan (secara transparan) kepada masyarakat. Desentralisasi fiskal terdiri dari empat pilar, yaitu aspek pengeluaran, penerimaan, bantuan dan pinjaman daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan dampak yang positif dan negatif. Keuntungan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa timbulnya efisiensi dan kompetisi antar daerah. Sedangkan dampak negatif berupa eksternalitas, skala produksi dan inefisiensi perpajakan (Rosen, 1999; 479-483).

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat “hypothesis testing”, dimana pengujian terhadap hipotesis diturunkan dari teori desentralisasi fiskal. Objek utama dalam penelitian ini adalah keempat pilar desentralisasi fiskal yang terdiri dari pengeluaran, penerimaan, transfer dan pinjaman daerah.

Data skunder yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik “*Uji data dua sampel yang tidak berhubungan*”, khususnya berupa uji **Mann-Whitney** dengan bantuan program SPSS.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data empiris yang ditampilkan pada Tabel 1 secara keseluruhan variabel-variabel keuangan daerah dan PDRB Kota Palembang dari

tahun 1995 sampai dengan tahun 2003 cenderung mengalami peningkatan. Bahkan bila dilakukan pemisahan antara era sebelum otonomi daerah dan setelah pelaksanaan otonomi daerah terdapat perbedaan yang cukup berarti, baik untuk nilai PAD, dana perimbangan, laba BUMD dan pengeluaran daerah.

Seperti yang diisyaratkan oleh UU No. 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat daerah, bahwa melalui pelaksanaan otonomi daerah diharapkan agar pemerintah kota dapat menggali potensi keuangan yang dimiliki.

Tabel 1.
Penerimaan Dana Perimbangan dan Pengeluaran
Kota Palembang Tahun 1993 s/d 2002 (Dalam Ribu Rupiah)

No	Tahn	PAD	Perimbangn	BUMD	Pdptn Lain-lain	Pglrn Daerah	PDRB
1	1995	13.980.751	68.249.575	144.187	1.521.048	88.188.985	3.344.913
2	1996	12.049.321	57.945.305	92.881	1.395.444	99.069.204	3.980.787
3	1997	17.081.875	89.883.010	207.243	1.267.960	106.893.185	4.670.319
4	1998	18.352.028	96.360.848	145.680	2.839.417	112.345.960	6.809.872
5	1999	23.262.478	125.674.276	291.370	1.303.461	149.361.900	7.941.073
6	2000	25.215.879	125.674.276	388.729	639.996	149.361.900	8.924.252
7	2001	35.510.300	317.935.309	250.000	281.853	420.882.083	10.269.137
8	2002	51.292.417	387.059.753	903.810	6.748.089	453.648.765.	10.269.137
9	2003	49.520.551	468.445.914	800.000	1.047.003	511.166.465	

Sumber : BPS

Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Palembang, khususnya aspek fiskal dapat diuji dengan menggunakan statistik non-parametrik, sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan yang nyata bila dibandingkan dengan era sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 1 dengan menggunakan uji Mann-Whitney dapat diketahui, bahwa :

- Probabilitas PAD sebesar $0,020$ ($0,020 < 0,05$), maka H_0 ditolak, sehingga nilai PAD secara statistik memang berbeda bila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.
- Probabilitas laba BUMD sebesar $0,071$ ($0,071 < 0,05$), maka H_0 ditolak, sehingga nilai laba BUMD secara statistik memang berbeda bila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.
- Probabilitas lain-lain pendapatan yang sah sebesar $0,606$ ($0,606 > 0,05$), maka H_0 diterima, sehingga lain-lain pendapatan yang sah secara statistik tidak berbeda bila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.
- Probabilitas transfer sebesar $0,017$ ($0,017 < 0,05$), maka H_0 ditolak, sehingga nilai transfer secara statistik memang berbeda bila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.
- Probabilitas pengeluaran sebesar $0,020$ ($0,020 < 0,05$), maka H_0 ditolak, sehingga nilai pengeluaran secara statistik memang berbeda bila dibandingkan dengan sebelum otonomi daerah.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan variabel keuangan daerah secara statistik mengalami peningkatan. Nilai PAD dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, namun diupayan untuk tidak mendistorsi iklim investasi di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Boex, Jameson, 2001. **An Introductory Overview of Intergovernmental Fiscal Relations.** International Study Program School of Policy Studies Georgia State University. Atlanta, Georgia.
- Ma, Jun, 1997. **Intergovernmental Fiscal Transfer in Nine Countries : Lessons From Developing Countries.** Policy Research Working Paper 1822. The World Bank Economic Institute Macroeconomic Management and Policy Division.
- Mahi, Raksaka, 2000. Kebijakan Bantuan Pusat Ke Daerah: Implikasinya Terhadap Pertumbuhan dan Pemerataan Antar Daerah Disampaikan pada **Kongres ISEI XIV** di Makasar, 21-23 April 2000.
- Morris, Nick, 2002. Fiscal Capacity and Expenditures at Different Levels of Government. **Asian Development Bank TA No: 3777-INO.**
- Oates, Wallace E, 1972. **Fiscal Federalism.** Princeton University, USA
- _____, 1999. An Essay On Fiscal Federalism. **Journal of Economic Literature.** Vol XXXVII, September 1999.
- Shah, Anwar, 1994. A Fiscal Need Approach to Equalization Transfer in a Decentralization. **Policy Research Working Paper 1289.** The World Bank Policy Research Departement Public Economic Division.
- Sjafrizal, 2000. Ketimpangan Ekonomi Daerah: Tendensi Penyebab dan Kebijakan Penanggulangan. Disampaikan pada **Kongres ISEI XIV** di Makasar; 21-23 April 2000.
- Thimmaiah, 2000. Decentralization and Economic Development: Indian Experience in Decentralization and Economic Development in Asian Countries. **International Symposium,** Hitosubashi University, January 7-8, 2000.
- Statistik Keuangan Daerah, Badan Pusat Statistik.
